

**PERBAIKAN CASCADING
BIRO HUKUM**

No	KINERJA UTAMA KEPALA BIRO HUKUM
1	Meningkatnya pelayanan terhadap stake holder dalam hal Produk Hukum Daerah Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan
2	Tingkat penanganan masalah hukum di lingkungan Pemprov. Kalsel
3	Meningkatkan Kepuasan pelayanan bantuan hukum
4	Diakuinya provinsi Kalimantan Selatan Sebagai Provinsi Peduli HAM
Indikator Kinerja Utama	
- Tingkat Indeks kepuasan pelayanan yang telah diberikan	
- Persentase tingkat kemenangan pada setiap proses peradilan	
- Tingkat indeks kepuasan pelayanan bantuan hukum yang diberikan	
- Diraihnya Predikat sebagai Provinsi Peduli HAM	

No	Kinerja Utama KABAG EVALUASI DAN DOKUM
1	Kesesuaian produk hukum pemerintah Kabupaten/Kota
2	Inventarisasi Peraturan Daerah Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan
3	Terlaksananya Pendokumentasian dan penyebaran Informasi Peraturan Perundang-undangan di Kalimantan Selatan
Indikator Kinerja	
Persentase Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/walikota yang sesuai ketentuan perundang-undangan	
Persentase Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota yang tertib administrasi	
Tingkat kepuasan pelayanan informasi hukum	

No	Kinerja Utama KABAG PERATURAN PER-UU
1	Tercapainya Mutu Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel
2	Menurunnya produk hukum daerah yang menghambat pembangunan dan meningkatnya simplifikasi regulasi
Indikator Kinerja	
Persentase produk hukum daerah Prov. Kalsel yang sesuai ketentuan perundang-undangan	
Persentase Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan	
laporan hasil kajian Produk Hukum Prov. Kalsel	

No	Kinerja Utama KABAG BANTUAN HUKUM DAN HAM
1	Penanganan perkara litigasi dan non litigasi di lingkungan pemerintah prov. Kalsel
2	Terpenuhinya bantuan hukum kepada masyarakat miskin pencari keadilan di Provinsi Kalsel
3	Terwujudnya Kab/Kota yang mengimplementasikan RANHAM dengan baik
4	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Biro Hukum
5	Pelayanan Sarana Prasarana dan Administrasi Perkantoran
Indikator Kinerja	
Persentase penanganan litigasi kepada unsur-unsur pemerintah di Prov. Kalsel yang diselesaikan di setiap tingkat peradilan	
Persentase penanganan penyelesaian non Litigasi di lingkungan Pemprov. Kalimantan Selatan	
Persentase pemenuhan bantuan hukum kepada masyarakat miskin yang memerlukan bantuan hukum	
Persentase Kab/Kota yang diikutkan dalam penilaian Kab/Kota peduli HAM	
Nilai saki Biro Hukum	
Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan Biro Hukum	

No	Kinerja Utama KSB. EVALUASI DAN FASILITASI WIL. I
1	Kesesuaian Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/walikota pada wilayah I dengan Peraturan Perundang-undangan
2	Inventarisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kab/Kota Wilayah I di Provinsi Kalimantan Selatan
3	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi PERDA Kab/Kota dan Perbub/Perwali wilayah I
4	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi Pengawasan Kebijakan Daerah
Indikator Kinerja	
Jumlah Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/walikota wilayah I yang berhasil dievaluasi dan difasilitasi	
Jumlah Rancangan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah I yang terinventarisasi dan teregistrasi	
Jumlah PERDA Kab/Kota, Perbub/Perwali yang telah ditindak lanjuti oleh Kab/Kota wilayah I	
Jumlah Peserta Workshop Pengawasan Kebijakan Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	

No	Kinerja Utama KSB. PERUMUSAN PERDA
1	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi tentang produk hukum daerah Provinsi Kalsel
2	Terpenuhinya peraturan daerah yang sesuai dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan yang baik.
Indikator Kinerja	
Jumlah Peserta Workshop Produk Hukum Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	
Jumlah Perda yang disosialisasikan	
Persentase Raperda yang diterima legislatif	

No	Kinerja Utama KSB. SENGKET HUKUM DAN HAM
1	Tercapainya mutu legal drafting kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD yang sesuai ketentuan perundang-undangan
2	Asistensi penyelesaian non litigasi di lingkungan Pemprov Kalsel
3	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi tentang Bantuan Hukum Daerah
4	Terlaksananya Pengawasan dan pembinaan penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan lingkup Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel
5	Terlaksananya pengawasan pelaksanaan RANHAM dan penilaian kriteria Kab/kota peduli HAM
6	Meningkatnya Pengetahuan aparatur tentang Hak Asasi Manusia di Kalimantan Selatan
Indikator Kinerja	
Jumlah kesepakatan bersama, perjanjian kerjasama dan NPHD lainnya yang ditelaah dan diselesaikan	
Jumlah asistensi Non litigasi di lingkungan Pemprov. Kalsel	
Jumlah Peserta Work Shop Bantuan Hukum Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	
Jumlah laporan hasil penyelesaian sengketa hukum diluar pengadilan yang diterima	
Jumlah Dokumen Penilaian kriteria Kab/Kota Peduli HAM yang terverifikasi	
Jumlah Peserta Workshop HAM yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	

No	Kinerja Utama KSB. EVALUASI DAN FASILITASI WIL. II
1	Kesesuaian Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/walikota pada wilayah II dengan Peraturan Perundang-undangan
2	Inventarisasi Peraturan Pemerintah Daerah Kab/Kota Wilayah II di Provinsi Kalimantan Selatan
3	Terlaksananya pengawasan tindak lanjut hasil evaluasi dan fasilitasi PERDA Kab/Kota dan Perbub/Perwali wilayah II
Indikator Kinerja	
Jumlah Raperda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/walikota pada wilayah II yang berhasil dievaluasi dan difasilitasi	
Jumlah Rancangan Produk Hukum Pemerintah Kabupaten/Kota wilayah II yang terinventarisasi dan teregistrasi	
Jumlah PERDA Kab/Kota, Perbub/Perwali yang telah ditindak lanjuti oleh Kab/Kota wilayah II	

No	Kinerja Utama KSB. PERUMUSAN PRODUK HUKUM LAINNYA
1	Tercapainya mutu legal drafting produk hukum daerah lainnya (Pergub/Keppub) yang sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan
Indikator Kinerja	
Jumlah produk hukum daerah lainnya Pemprov. Kalsel yang telah diharmonisasi dan sesuai ketentuan perundang-undangan	

No	Kinerja Utama KSB. PERLINDUNGAN HUKUM
1.	Tertanganinya gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang telah dikuasakan
2.	Meningkatnya Pengawasan dan pembinaan penanganan perkara di pengadilan lingkup Pemerintah provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel
3.	Tertanganinya bantuan hukum masyarakat miskin
Indikator Kinerja	
Jumlah penanganan gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang di menangkan pada tingkat Pertama	
Jumlah penanganan gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang di menangkan pada tingkat Banding	
Jumlah penanganan gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang di menangkan pada tingkat Kasasi	
Jumlah penanganan gugatan (litigasi) terhadap pemerintah provinsi Kalsel yang di menangkan pada tingkat Peninjauan Kembali (PK)	
Jumlah laporan hasil monitoring penanganan Perkara di pengadilan di provinsi dan Kabupaten/Kota di Kalsel yang dapat dimanfaatkan sebagai rekomendasi	
Persentase advice permohonan bantuan hukum masyarakat miskin yang diteruskan ke OBH	

No	Kinerja Utama KSB. DOKUMENTASI HUKUM
1.	Tertibnya pendokumentasian Dokumen hukum
2.	Meningkatnya pembinaan jaringan dokumentasi dan informasi (JDI) hukum
3.	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi tentang JDIH
Indikator Kinerja	
Jumlah dokumen hukum yang terdokumentasi dengan baik	
Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan agar tertib dalam pengelolaan JDIH	
Jumlah Peserta Workshop JDIH yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	

No	Kinerja Utama KSB. PENGKAJIAN PRODUK HUKUM
1.	Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah Provinsi Kalsel
2.	Terinventarisasi Regulasi dan teridentifikasinya masalah produk hukum daerah provinsi Kalsel
3.	Meningkatnya pemahaman/pengetahuan aparatur dan terwujudnya kesamaan persepsi tentang Pengkajian Produk Hukum di Provinsi Kalsel
Indikator Kinerja	
Jumlah produk hukum Daerah provinsi Kalsel yang di simplifikasi	
Jumlah produk hukum daerah Provinsi Kalsel yang siap dikaji	
Jumlah Peserta Workshop Simplifikasi Regulasi Produk Hukum Daerah yang lulus Post tes dengan nilai ≥ 80	

No	Kinerja Utama KSB. TATA USAHA
1	Merencanakan kebutuhan sarana dan prasarana serta administrasi perkantoran
2	Menyusun perencanaan dan pelaporan Kinerja biro Hukum
3	Menyusun perencanaan dan administrasi keuangan Biro Hukum
4	Menyusun data kepegawaian, evaluasi, serta administrasi kepegawaian
5	Terpenuhinya koleksi buku tentang Hukum
Indikator Kinerja	
Jumlah dokumentasi pelayanan surat menyurat	
Jumlah Aset yang tercatat	
Jumlah Dokumen terkait sarana dan Prasarana	
Nilai Komponen pelaporan LKIP Biro Hukum	
Nilai Komponen perencanaan LKIP Biro Hukum	
Jumlah dokumen kinerja sesuai ketentuan	
Jumlah dokumen laporan keuangan secara berkala	
Jumlah pegawai yang administrasi kepegawaiannya dilayani secara tertib.	
Jumlah pembelian dokumen hukum	

Banjarbaru, September 2017

Mengetahui
KEPALA BIRO HUKUM,

A. FYDAYEEN, S.H., M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19700202 199603 1 002